



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2023

Subbag Program Informasi & Humas

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 49, Sukaramai, Banda Aceh

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai wujud penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 merupakan upaya perwujudan capaian kinerja pada tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 terdiri atas : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPA Tahun 2021, Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab 5 Penutup. Berkenaan dengan itu, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2023, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banda Aceh, Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH



Dr. YUSRIZAL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750617 199311 1 001

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2021	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2021.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Aceh.	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	27
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja perubahan Perangkat Aceh.....	38
a. Tujuan.....	38
b. Sasaran.....	38
3.2. Kebijakan.....	39
3.3. Program dan Kegiatan	43
BAB IV. PENUTUP	63

Daftar Tabel

	Halaman
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial TA. 2021	12
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh TA. 2021	13
Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	31
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	47
Program Kegiatan Pendanaan Renja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023.....	53

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 s.d 2026 sebagaimana Intruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 disebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu dan merealisasikan seluruh pencapaian visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 berupaya untuk merealisasikan seluruh Visi dan Misi Pemerintah Aceh untuk Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat yang termaktub didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup sisi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada

merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan yang keberadaan kelembagaannya ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang eselon III/a serta 4 (empat) kepala UPTD eselon III/b yang menangani masalah intern dinas.

Bidang teknis dalam Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. UPTD. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;
2. UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
3. UPTD. Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang;
4. UPTD. Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman juga sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023, bidang pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 31. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Merupakan perubahan dari Qanun Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 32. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
 33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;
 34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;

35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 untuk menjamin adanya keselarasan dan kesinambungan perencanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, program Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat terutama di sektor pembangunan kesejahteraan sosial.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 adalah :

- 1) Sebagai rancangan awal Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk miskin,
- 2) Sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial skala Nasional dan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh.
- 3) Sebagai instrumen pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2021
- 2.3. Analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
- 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Dinas Sosial Aceh
- 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Aceh
 - a. Tujuan
 - b. Sasaran
- 3.2. Kebijakan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2021 Dan Renstra Dinas Sosial Aceh

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 129,428,822,580,-** (*seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Aceh dan 4 (Empat) program rutinitas kantor yang terbagi dalam 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 106 (seratus enam) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor: 90 Tahun 2019.

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 tersebut, Dinas Sosial Aceh mengalokasikan **TOTAL ANGGARAN Rp. 129,428,822,580,-** (*seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) yang dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk **BELANJA PEGAWAI (GAJI ASN)** sebesar **Rp 19,720,188,281,-** (*sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) dan untuk **BELANJA OPERASI** sebesar **Rp. 109,708,634,299,-** (*seratus Sembilan milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

**ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2021**

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Bidang Pelaksana
01	02	03	04
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39,855,152,606,-	Sekretariat
2.	Program Pemberdayaan Sosial	11,469,555,357,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	848,512,072,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Program Rehabilitasi Sosial	35,930,641,109,-	Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	14,409,616,925,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Program Penanganan Bencana	25,957,929,841,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	957,414,670,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
Total Anggaran		129,428,822,580,-	<i>(seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah)</i>

TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>
	DINAS SOSIAL ACEH	129,428,822,580.00	109,193,170,955.00	84.37	84.37
	BELANJA OPERASI (GAJI ASN)	19,720,188,281.00	18,157,338,533.00	92.07	92.07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,720,188,281.00	18,157,338,533.00	92.07	92.07
	BELANJA OPERASI	109,708,634,299.00	91,035,832,422.00		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20,134,964,325.00	17,580,230,934.00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,400,000,000.00	1,013,924,000.00	72.42	72.42
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650,000,000.00	412,141,500.00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	690,000,000.00	542,592,500.00	78.64	78.64
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000.00	59,190,000.00	98.65	98.65
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,471,000,000.00	8,949,201,000.00	94.49	94.49
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	19,996,000.00	99.98	99.98
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	132,700,000.00	127,017,500.00	95.72	95.72
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44,510,400.00	44,094,600.00	99.07	99.07
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,000,000.00	99,404,606.00	99.40	99.40

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	49,065,000.00	98.13	98.13
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	48,368,000.00	96.74	96.74
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79,999,051.00	79,040,500.00	98.80	98.80
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479,151,860.00	381,121,500.00	79.54	79.54
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	383,463,000.00	376,573,550.00	98.20	98.20
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349,920,000.00	308,190,000.00	88.07	88.07
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119,768,925.00	116,183,546.00	97.01	97.01
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,763,900.00	39,136,000.00	98.42	98.42
18	Penyediaan Bahan/Material	269,967,791.00	267,799,500.00	99.20	99.20
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149,940,000.00	148,816,000.00	99.25	99.25
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000.00	897,856,714.00	89.79	89.79
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	101,460,000.00	79,272,525.00	78.13	78.13
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	258,500,000.00	252,740,000.00	97.77	97.77
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,835,000.00	43,000,000.00	98.10	98.10
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599,445,000.00	529,800,000.00	88.38	88.38
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196,000,000.00	195,030,000.00	99.51	99.51
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172,102,771.00	149,731,853.00	87.00	87.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,525,305.00	94,030,000.00	95.44	95.44
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,039,749,608.00	968,959,000.00	93.19	93.19

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,835,000.00	43,000,000.00	98.10	98.10
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599,445,000.00	529,800,000.00	88.38	88.38
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196,000,000.00	195,030,000.00	99.51	99.51
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172,102,771.00	149,731,853.00	87.00	87.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,525,305.00	94,030,000.00	95.44	95.44
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,039,749,608.00	968,959,000.00	93.19	93.19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,912,000.00	24,809,865.00	99.59	99.59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,284,600,758.00	467,541,579.00	36.40	36.40
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,700,385.00	226,310,000.00	90.63	90.63
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176,863,000.00	163,863,000.00	92.65	92.65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115,632,000.00	49,681,065.00	42.96	42.96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843,508,478.00	601,253,600.00	71.28	71.28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500,000,000.00	499,460,000.00	99.89	99.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119,943,093.00	119,361,000.00	99.51	99.51

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170,002,000.00	149,599,431.00	88.00	88.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	249,940,515.00	228,204,100.00	91.30	91.30
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	467,969,593.00	420,540,650.00	89.86	89.86
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	7,410,223,210.00	6,900,707,298.00	93.12	93.12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	828,325,825.00	750,938,755.00	90.66	90.66
No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
01	02	03	04	05	06
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2,513,096,214.00	1,883,322,500.00	74.94	74.94
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	848,512,072,00	477,354,710,00	56,26	56,26
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	848,512,072,00	477,354,710,00	56,26	56,26

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	848,512,072.00	477,354,710.00	56.26	56.26
Program Rehabilitasi Sosial	35,930,641,109.00	28,609,454,167.00	79,62	79,62
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	6,754,891,417.00	6,044,787,358.00	89,49	89,49
Penyediaan Permakanan	948,750,000.00	948,750,000.00	100.00	100.00
Penyediaan Sandang	137,240,000.00	136,443,000.00	99.42	99.42
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2,255,328,852.00	1,563,141,971.00	69.31	69.31
Penyediaan Alat Bantu	2,839,953,832.00	1,027,205,000.00	36.17	36.17
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	349,785,000.00	342,360,000.00	97.88	97.88
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	24,984,000.00	24,801,550.00	99.27	99.27
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	9,999,800.00	2,999,800.00	30.00	30.00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	78,000,000.00	78,000,000.00	100.00	100.00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	156,598,230.00	110,962,300.00	70.86	70.86
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34,997,164.00	34,978,500.00	99.95	99.95
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	6,754,891,417.00	6,044,787,358.00	89.49	89.49
Pengasuhan	39,950,000.00	35,750,000.00	89.49	89.49
Penyediaan Makanan	1,668,660,000.00	1,538,784,200.00	92.22	92.22
Penyediaan Sandang	508,202,008.00	466,318,320.00	91.76	91.76
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2,180,932,472.00	1,873,619,788.00	85.91	85.91

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	129,938,820.00	125,237,200.00	96.38	96.38
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	79,600,000.00	79,600,000.00	100.00	100.00
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	718,099,999.00	688,182,950.00	95.83	95.83
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	17,380,000.00	17,276,000.00	99.40	99.40
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1,163,655,424.00	1,043,736,900.00	89.69	89.69
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	49,705,694.00	41,312,000.00	83.11	83.11
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	179,035,000.00	117,240,000.00	65.48	65.48
Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	19,732,000.00	17,730,000.00	89.85	89.85
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5,029,815,119.00	3,844,165,434.00	76.43	76.43
Penyediaan Permakanan	1,349,165,119.00	1,214,985,000.00	90.05	90.05
Penyediaan Sandang	341,250,000.00	335,191,450.00	98.22	98.22
Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	2,150,000,000.00	1,323,576,621.00	61.56	61.56
Penyediaan Alat Bantu	175,000,000.00	81,169,550.00	46.38	46.38
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	163,900,000.00	151,260,113.00	92.29	92.29
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	150,000,000.00	141,790,000.00	94.53	94.53
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	276,250,000.00	251,646,000.00	91.09	91.09
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	10,000,000.00	6,495,500.00	64.96	64.96
Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	258,850,000.00	228,190,000.00	88.16	88.16
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	70,000,000.00	37,163,200.00	53.09	53.09
Pemulasaraan	15,400,000.00	15,400,000.00	100.00	100.00

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	1,130,844,734.00	1,059,457,485.00	93.69	93.69
Penyediaan Permakanan	337,920,000.00	331,920,000.00	98.22	98.22
Penyediaan Sandang	52,437,150.00	52,196,000.00	99.54	99.54
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	126,512,245.00	96,396,285.00	76.20	76.20
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	15,996,660.00	15,994,750.00	99.99	99.99
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	80,600,000.00	70,600,000.00	87.59	87.59
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	91,800,000.00	89,935,000.00	97.97	97.97
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	203,968,779.00	202,817,750.00	99.44	99.44
asilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	9,999,900.00	5,173,900.00	51.74	51.74
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10,000,000.00	9,000,000.00	90.00	90.00
Pemulangan ke Daerah Asal	201,610,000.00	185,423,800.00	91.97	91.97
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di LuarHIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	15,614,952,961.00	12,853,677,289.00	82.32	82.32
Penyediaan Permakanan	11,771,126,518.00	10,347,170,642.00	87.90	87.90
Penyediaan Sandang	49,968,300.00	49,236,000.00	98.53	98.53
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	1,549,527,757.00	1,018,789,800.00	65.75	65.75
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	1,189,197,500.00	538,420,000.00	45.28	45.28
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	99,814,303.00	94,941,303.00	95.12	95.12
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	99,442,303.00	31,750,000.00	31.93	31.93
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	505,876,280.00	491,712,510.00	97.20	97.20

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	100,000,000.00	74,197,600.00	74.20	74.20
Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	200,000,000.00	185,472,034.00	92.74	92.74
Pemulangan ke Daerah Asal	50,000,000.00	21,987,400.00	43.97	43.97
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14,409,616,925.00	13,241,797,589.00	91.90	91.90
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	499,513,932.00	472,127,230.00	94.52	94.52
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	499,513,932.00	472,127,230.00	94.52	94.52
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	13,910,102,993.00	12,769,670,359.00	91.80	91.80
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8,876,805,066.00	8,148,340,408.00	91.79	91.79
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5,033,297,927.00	4,621,329,951.00	91.82	3.57
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	25,957,929,841.00	20,102,365,319.00	77.44	77.44
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	25,957,929,841.00	20,102,365,319.00	77.44	77.44
Penyediaan Permakanan	6,047,747,440.00	4,237,812,030.00	70.07	70.07
Penyediaan Sandang	8,139,997,000.00	6,404,042,500.00	78.67	78.67
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	799,974,573.00	663,850,000.00	82.98	82.98
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10,399,520,001.00	8,388,025,209.00	80.66	80.66
Pelayanan Dukungan Psikososial	570,690,827.00	408,635,580.00	71.60	71.60
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	957,414,670.00	840,916,400.00	87.83	87.83
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	957,414,670.00	840,916,400.00	87.83	87.83

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	607,414,670.00	494,287,400.00	81.38	81.38
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	100.00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	150,000,000.00	146,629,000.00	97.75	97.75

**Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh
Tahun Anggaran 2021**

Anggaran Dinas sosial Aceh tahun 2021 sebesar **Rp. 129,428,822,580.00,-** (*seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), yang tersebar pada empat bidang teknis, satu sekretariat dan empat UPTD/Panti Sosial, digunakan untuk membiayai sepuluh program pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2021, dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 129,428,822,580.00,-** (*seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), adalah sebesar **Rp. 109,193,170,955.00 (84,37%)** sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 20,235,651,625.00,- (15,63%)**.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Aceh pada tahun 2021 mencapai rata-rata sebesar **(84,37%)** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 129,428,822,580.00,-** dan realisasi sebesar **Rp. 109,193,170,955.00,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **(84,37%)**, hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebesar **4,78 %**. Dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh Tahun 2021

Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2021, realisasi keuangan mencapai (84,37%). Sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Dinas Sosial Aceh telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2021, berdasarkan hasil penetapan pagu anggaran APBA Dinas Sosial Aceh Tahun 2021 sebesar Rp. 129,428,822,580.00,- (*seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh*

rupiah) Review hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2021, yakni pencapaian **dibawah 80%**, yaitu

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar **50,51%**.
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 56,26 %
- Program Rehabilitasi Sosial sebesar 79,62%
- Program Penanganan Bencana sebesar 77,44%

2. Adapun realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2021, yakni pencapaian **diatas 80%**:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 87,31%
- Program Pemberdayaan Sosial sebesar 88,79%
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar 91.90%
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 87,83%

3. Capaian Dinas Sosial Aceh terhadap realisasi keuangan pada angka 84,37% Tahun 2021 yang berada pada dibawah 90%, tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Untuk Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 56,26% disebabkan oleh sisa dana dari kegiatan pemulangan warga bermasalah baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak bisa diprediksi karena tergantung kepada ada tidaknya warga yang mengalami tindak kekerasan di dalam maupun di luar negeri.

Untuk program rehabilitasi sosial sebesar 79,62% disebabkan oleh adanya rincian objek belanja yang tidak sesuai kode rekening dan harus dilakukan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh namun pada tahun anggaran 2021 tidak ada perubahan anggaran, sehingga ada beberapa objek belanja yang tidak terealisasi.

Untuk Program Penanganan Bencana sebesar 77,44% disebabkan oleh adanya rincian objek belanja yang tidak sesuai kode rekening dan harus dilakukan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh namun pada tahun anggaran 2021 tidak ada perubahan anggaran, sehingga ada beberapa objek belanja yang tidak terealisasi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Aceh

1. Peningkatan Fungsi UPTD dan Penambahan UPTD Dinas Sosial Aceh

Saat ini Dinas Sosial Aceh baru memiliki 4 UPTD yaitu UPTD yang melayani Lanjut usia terlantar, melayani Disabilitas Netra Terlantar dan Tuna Sosial terlantar, anak terlantar dan UPTD yang melayani Anak Putus Sekolah. Masing-masing UPTD mempunyai wilayah jangkauan se provinsi Aceh yaitu 23 kabupaten/kota, dengan daya tampung masing-masing tidak lebih dari 80 orang, tentunya hal ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan fungsi UPTD agar dapat merespon permasalahan-permasalahan social yang terjadi di provinsi Aceh.

Merujuk pada standard pelayanan minimal yang mewajibkan Pemerintah Provinsi melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan dan pengemis terlantar, maka dengan kondisi UPTD yang ada di Dinas Sosial saat ini penting dilakukan penambahan UPTD yaitu :

1. UPTD yang melayani Disabilitas terlantar
2. UPTD yang melayani gelandangan dan pengemis terlantar

3. Rumah Perlindungan dan Trauma Center

Hal ini penting segera dilaksanakan mengingat Dinas Sosial Provinsi harus menerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kabupaten/kota yang tidak lagi memiliki keluarga atau terlantar.

4. Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi Masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematis untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh, kebijakan, SDM, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

5. Peningkatan Kualitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Metode Proxy-Mean Testing (PMT). Data ini sangat penting fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sehingga koordinasi pengelolaannya perlu dilakukan bersinergi dengan setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Saat ini pemanfaatan data terpadu tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih dilihat sebatas hanya terkait dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat. Basis data terpadu ini belum dimanfaatkan

secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

6. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kunci kesuksesan program-program kesejahteraan sosial dari Dinas sosial ada pada sumber daya manusia (SDM). Program-program kesejahteraan sosial harus didukung SDM yang memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial; Pekerja Sosial; Relawan Sosial; dan Penyuluh Sosial. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompetensi. Saat ini belum semua Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial di provinsi Aceh mendapat sertifikasi, hal ini menjadi prioritas kedepan Dinas Sosial Aceh untuk mengupayakan proses sertifikasi tersebut.

Kelembagaan Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelembagaan sosial ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan bidang sosial.

7. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.

Integrasi layanan kesejahteraan Sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program. Hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan sosial secara terpadu. Sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.

Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga

lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan SKPA lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga layanan Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Sosial Aceh masih dihadapkan pada permasalahan mendasar. Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

- ✓ Wilayah Aceh yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, pedalaman hutan, laut dan kepulauan. Dimana masing-masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah.
- ✓ Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami bencana alam besar, tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian Masyarakat Aceh korban bencana tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.
- ✓ Aceh juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Aceh terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi Masyarakat.
- ✓ Aceh juga merupakan wilayah pasca bencana sosial yaitu konflik sosial yang sudah sejak lama terjadi dan baru berakhir pada tahun 2005. Dampak konflik jangka panjang masih sangat terasa, antara lain tempat tinggal/rumah yang

banyak hancur, sarana dan prasarana publik yang banyak rusak, permasalahan sosial, psikologis dan keterpurukan ekonomi, reintegrasi, rekonsialisasi dan proses menuju perdamaian yang hakiki di Aceh.

- ✓ Program-program penanganan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab/kota masih sangat bergantung pada pemerintah provinsi, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.
- ✓ Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah PMKS di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan sangat kompleks dalam penanganannya.

8. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait PSKS, PMKS serta capaian pembangunan kesejahteraan Sosial di Aceh. Sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan secara berkesinambungan.

Pemanfaatan informasi kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Kabupaten/Kota sehingga sulit mengukur keberhasilan program yang diberikan oleh instansi tersebut.

9. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi

Anak merupakan seorang individu yang membutuhkan perlindungan dikarenakan masih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Keluarga sebagai bagian terdekat dengan anak merupakan tempat tumbuh dan kembang anak. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup. Dalam prosesnya pelaksanaan program perlindungan anak membutuhkan pusat-pusat layanan dan rehabilitasi bagi proses pemulihan dan perlindungan anak-anak yang mengalami penelantaran, eksploitasi dan kekerasan.

Keluarga sebagai sistem yang terdekat dengan anak juga membutuhkan penguatan dan pemberdayaan agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pengasuhan anak. Disisi lain, melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan Sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan anggota keluarganya. Keterlibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan Sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan bidang sosial bagi anak harus bisa dilakukan secara sistemik agar layanan yang diberikan berimplikasi positif dan bermanfaat pada

tumbuh kembang anak. Sangat besar kemungkinan bagi yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Dinas Sosial Aceh 2022

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan hasil analisis kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan bidang sosial pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **PAGU indikatif** Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2022 yakni : **Rp. 128,025,000,000,-** (*seratus dua puluh delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yakni terdiri atas:
 - Belanja Operasi : Rp. 118,922,693,539,-
 - Belanja Modal : Rp . 9,102,306,461,-
 - Belanja Transfers : Rp . 0,-
2. Kegiatan **BELANJA OPERASI**, yakni anggaran yang alokasikan pada DPA Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 128,025,000,000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Keterangan
01	02	03	04	05
	Dinas Sosial		128,025,000,000,-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500,000,000,-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550,000,000,-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,021,440,189,-	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,010,750,000,-	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22,000,000,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62,397,252	

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	110,000,000,-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75,000,000,-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197,000,000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97,587,754,-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	672,151,860,-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	283,463,000,-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249,920,000,-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119,768,925,-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44,163,900,-	
		Penyediaan Bahan/Material	186,071,592,-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	149,940,000,-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920,000,000,-	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	178,870,000,-	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	316,500,000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	969,994,571,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44,912,000,-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	637,463,920,-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,500,385,-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178,333,000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	135,632,000,-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	843,507,000,-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,000,000,000,-	
	Program Pemberdayaan Sosial			
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uangatau Barang	200,000,005,-	

	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	741,817,954,-	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	8,550,000,000,-	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	925,000,000,-	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	430,000,000,-	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	805,506,808,-	
	Program Rehabilitasi Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
		Penyediaan Permakanan	1,000,000,000,-	
		Penyediaan Sandang	150,000,000,-	

		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3,811,676,408,-	
		Penyediaan Alat Bantu	115,000,000,-	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	98,799,000,-	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	214,000,000,-	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	275,000,000,-	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	25,000,000,-	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50,000,000,-	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	94,500,000,-	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	63,000,000,-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	67,500,000,-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
		Pengasuhan	80,000,000,-	
		Penyediaan Makanan	2,515,000,000,-	
		Penyediaan Sandang	500,000,000,-	
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	8,156,100,000,-	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	248,800,000,-	

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1,585,000,000,-	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	504,670,000,-	
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	3,750,000,-	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	190,000,000,-	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	158,300,000,-	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	94,500,000,-	
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	10,000,000,-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	125,000,000,-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
	Penyediaan Permakanan	1,423,500,000,-	
	Penyediaan Sandang	320,000,000,-	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1,900,000,000,-	
	Penyediaan Alat Bantu	28,000,000,-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	300,000,000,-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	200,000,000,-	

		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	280,000,000,-	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5,000,000,-	
		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	297,677,500,-	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	137,600,000,-	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75,000,000,-	
		Pemulasaraan	40,000,000,-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
		Penyediaan Permakanan	292,750,000,-	
		Penyediaan Sandang	90,000,000,-	
		Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	1,755,489,082,-	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	98,797,547,-	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	276,000,000,-	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	189,500,000,-	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	75,000,000,-	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	4,500,000,-	

		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30,000,000,-	
		Pemulangan ke Daerah Asal	63,000,000,-	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			
		Penyediaan Permakanan	9,150,294,908,-	
		Penyediaan Sandang	224,929,500,-	
		Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	474,972,760,-	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	433,125,000,-	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	134,995,000,-	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1,149,175,000,-	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	330,000,000,-	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	80,000,000,-	
		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	97,700,000,-	
		Pemulangan ke Daerah Asal	50,000,000,-	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah	600,000,000,-	

		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	499,999,971,-	
		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	79,999,800,-	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10,769,275,026,-	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,884,161,000,-	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12,120,709,456,-	
	Program Penanganan Bencana			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
		Penyediaan Permakanan	3,720,000,000,-	
		Penyediaan Sandang	1,950,000,000,-	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	700,000,000,-	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1,874,520,001,-	

		Pelayanan Dukungan Psikososial	620,690,827,-	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	803,350,099,-	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	500,000,000,-	
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	250,000,000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL ACEH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Dinas Sosial Aceh 2023

a. Tujuan

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung seperti: orang miskin, anak-anak terlantar dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (*difabel*) serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Sasaran

Dalam lima prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin periode 2019 – 2024 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan disebutkan bahwa program prorakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sementara program keadilan untuk semua fokus pada program keadilan bagi anak; program keadilan bagi perempuan; program keadilan di bidang ketenagakerjaan; program keadilan di bidang bantuan hukum; program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Berdasarkan hal tersebut, sasaran Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); baik individu, keluarga maupun masyarakat.
2. Pihak swasta, organisasi sosial dan masyarakat yang aktif melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta perguruan tinggi.
3. Pegawai Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Petugas Sosial di Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, dan lain-lain).

3.2 Kebijakan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial juga diselaraskan dengan 5 (lima) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin periode 2019 - 2024, sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Ke-dua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, dan yang mendongkrak lapangan kerja baru. Infrastruktur juga akan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ke-tiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.

Ke-empat, penyederhanaan birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan diprioritaskan.

Ke-lima, transformasi ekonomi. Presiden menjelaskan, yang dimaksud adalah bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Pertama, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Ke-dua, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam

mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Ke-tiga, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Ke-empat, Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
- Memajukan kebudayaan,
- Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
- Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- Meningkatkan budaya literasi.

Ke-lima, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
 - Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

Ke-enam, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon

Ke-tujuh, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,

- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Salah satu arah kebijakan yang ditetapkan adalah Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kehidupan secara Ekonomi, Sosial dan Spiritual. Arah kebijakan ini ditujukan untuk Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang salah satunya dicapai melalui Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk menciptakan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; menciptakan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; membentuk kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; menciptakan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; menjamin bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

3.3 Program Dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan standar pelayanan minimal yang belum dapat dicapai.

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang akan dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, tugas melaksanakan

urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan social meliputi *pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial*, maka Rencana Program dan Kegiatan (SKPA) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel : Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1.06.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.06.01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.06.01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.06.01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

1.06.01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.06.01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material
1.06.01	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.06.01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.06.01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

1.06.01			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.01	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.06.01	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1.06.01	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1.06.01	1.02	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.06.01	1.02	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.06.01	1.02	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.01	1.02	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.06.03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1.06.03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1.06.03	1.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1.06.04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1.06.04	1.01	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.01	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.01	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.06.04	1.01	4	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

1.06.04	1.01	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.01	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.06.04	1.01	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1.06.04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
1.06.04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1.06.04	1.02	1	Pengasuhan
1.06.04	1.02	2	Penyediaan Makanan
1.06.04	1.02	3	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.02	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.06.04	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1.06.04	1.02	8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1.06.04	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1.06.04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
1.06.04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1.06.04	1.03	1	Penyediaan Permakanan

1.06.04	1.03	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.03	3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
1.06.04	1.03	4	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
1.06.04	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.03	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.06.04	1.03	9	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.03	12	Pemulasaraan
1.06.04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1.06.04	1.04	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.04	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.04	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1.06.04	1.04	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
1.06.04	1.04	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.04	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.04	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.06.04	1.04	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.06.04	1.04	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.06.04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

1.06.04	1.05	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.05	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.05	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1.06.04	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
1.06.04	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.06.04	1.05	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.06.04	1.05	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.06.04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1.06.05	1.01	1	Pengangkatan Anak antar WNI
1.06.05	1.01	2	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1.06.05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.06.05	1.02	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.05	1.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05	1.02	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.06.06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.06.06	1.01	1	Penyediaan Permakanan
1.06.06	1.01	2	Penyediaan Sandang

1.06.06	1.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.06	1.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.06.06	1.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.06.07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Terhadap rincian pendanaan dan sumber dana program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh di tahun anggaran 2023 bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 31 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN RENJA DINAS SOAIAL ACEH TAHUN 2023

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Capaian Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	LOKASI
										2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target	Rp	19	20
					DINSOS						102,717,394,636		
					PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Dana Pendapatan Daerah					Dinsos	
					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana Pendapatan Asli Daerah					Dinsos	
					Retribusi Daerah			Tahun	1	1	5,100,000	Dinsos	
					JUMLAH BELANJA DAERAH							Dinsos	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Terlaksana				34,358,901,889	Dinsos	

1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Dokumen	9	9	1,922,035,518	Dinsos	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	1,042,266,656	Dinsos	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	9	9	758,068,862	Dinsos	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	121,700,000	Dinsos	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	22,496,438,279	Dinsos	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	144	144	20,308,473,119		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	2,157,965,160		
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	30,000,000		
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	1,078,731,648	Dinsos	
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	761.854.740		
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	75,000,000		
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	241,876,908		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	2,534,060,088	Dinsos	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Buah	200	200	97,581,594		

1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	25	25	304,075,000		
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit	15	15	299,730,655		
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	167,738,000		
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Buah	350	350	119,779,791		
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Exemplar	1350	1350	44,162,460		
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bulan	12	12	186,075,088		
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	105,000,000		
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400	400	707,068,000		
1	06	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	128,849,500		
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	374,000,000	Dinsos	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	%	100	100	2,407,932,124	Dinsos	
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2		1,882,720,000	Dinsos	
1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	525,212,124	Dinsos	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	%	100	100	1,582,656,232	Dinsos	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah	2.495	2,495	44,906,000	Dinsos	

1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	680,733,520		
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	350,484,800		
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	506,531,912		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	%	100	100	2,337,048,000	DINSOS	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	45	45	1,239,390,000		
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	45	96,660,000		
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	1,000,998,000		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	DINSOS		10,708,196,171	DINSOS	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Persentase kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang yang sesuai dengan ketentuan		65.18	70.75	200,003,135	DINSOS	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	25	20	200,003,135	DINSOS	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatnya kualitas PSKS yang mendapatkan penguatan	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan		65.18	70.75	10,508,193,036	DINSOS	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	100	108	987,403,766	DINSOS	

1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	289	290	7,602,711,996	DINSOS
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	200	165	1,011,782,960	DINSOS
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	75	30	906,294,314	DINSOS
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN ORBAN TINDAK KEKERASAN	Terseleenggaranya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%			699,999,797	DINSOS
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten / Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga	%	76.56		699,999,797	DINSOS
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	76	699,999,797	DINSOS
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Pant	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	%			35,159,205,864	DINSOS
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Pant	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Disabilitas terlantar dalam Pant	%	65.18	70.75	4,330,733,200	DINSOS
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	1,202,122,000	DINSOS
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	53	197,101,580	DINSOS
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak	Orang	50	53	1,273,924,247	DINSOS

1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	1,972,865,000	DINSOS
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	589,037,456	DINSOS
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	3,785,536,642	DINSOS
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	187,510,413	DINSOS
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	2,634,553,702	DINSOS
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	349,802,230	DINSOS
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	34,461,302	DINSOS
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	125	379,712,734	DINSOS
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	79	186,036,054	DINSOS
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	14	147,534,000	DINSOS
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	42,169,950	DINSOS

1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	0		265,466,700	DINSOS
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Lanjut Usia terlantar dalam Panti	%	65.18	70.75	4,883,932,642	DINSOS
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	1,404,270,000	DINSOS
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	180,623,480	DINSOS
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	1,148,973,495	DINSOS
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	45	70	34,139,221	DINSOS
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	386,499,778	DINSOS
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	1,010,500,000	DINSOS
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	265,326,000	DINSOS
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	6,155,000	DINSOS
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	63	27,000,000	DINSOS

1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	45	263,349,604	DINSOS
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	15	113,946,064	DINSOS
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	7	8	43,150,000	DINSOS
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	-	-	DINSOS
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam Panti	%	65.18	70.75	1,680,453,278	DINSOS
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	316,680,000	DINSOS
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	89,986,800	DINSOS
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	652,029,322	DINSOS
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	71,547,157	DINSOS
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	207,550,000	DINSOS
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	123,677,000	DINSOS
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	51,900,000	DINSOS

1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	6	5	10,999,999	DINSOS
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	13,500,000	DINSOS
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis / Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	50	35	142,583,000	DINSOS
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pantii	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantii	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantii	Dokumen	0		-	DINSOS
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Dalam Pantii	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	%	65.18	70.75	13,624,080,561	DINSOS
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	6275	6275	9,728,264,758	DINSOS
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	120	235,036,654	DINSOS
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1057	250	271,789,904	DINSOS
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantii	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantii Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantii Kewenangan Provinsi	Orang	809	185	376,786,000	DINSOS
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	30	60	609,717,431	DINSOS

1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	30	114,889,302	DINSOS
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	65	30	335,759,954	DINSOS
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	78	35	27,415,302	DINSOS
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	9	15	136,727,000	DINSOS
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	20	25	48,429,302	DINSOS
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	0	5	1,739,264,954	DINSOS
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. 2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	%			9,806,052,582	DINSOS
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial untuk pengangkatan anak (Adopsi)	Persentase anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat	%	100	100	579,999,131	DINSOS
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	0	12	399,999,631	DINSOS
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	3	3	179,999,500	DINSOS

1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin kewenangan provinsi	Persentase keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	73.91	100	9,226,053,451	DINSOS	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	0	108	2,799,012,171	DINSOS	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	Keluarga	939	65	1,839,365,166	DINSOS	
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	647	69	4,587,676,114	DINSOS	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	%			10,406,573,784	DINSOS	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	90	100	10,406,573,784	DINSOS	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	120,000	14260	4,597,231,180	DINSOS	
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	150,000	12500	2,249,890,564	DINSOS	
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	70	60	414,212,040	DINSOS	
1	06	06	1.01	04		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	33,233	854	1,197,211,007	DINSOS	
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	900	641	1,948,028,993	DINSOS	

1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat				1,578,464,549	DINSOS	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Yang Terawat	%	100	100	1,578,464,549	DINSOS	
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	2	855,631,097	DINSOS	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	6	6	490,789,800	DINSOS	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	12	12	232,043,652	DINSOS	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Bidang Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 merupakan turunan dari visi dan misi Pemerintah Aceh. Strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi Daerah, kebutuhan masyarakat dan organisasi kerja serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Oleh karena itu rancangan ini harus menjadi acuan bagi para implementator (pelaksana) dari satuan unit kerja organisasi dalam menyusun rencana kegiatan.

Pemerintah Aceh bersama DPRA dan Dinas Sosial Aceh bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi Renja ini melalui proses perencanaan pembangunan yang secara operasional tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh DPA-SKPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya.

Bappeda dan Dinas Sosial Aceh melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, interaktif lintas pelaku, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Pemerintah Aceh dan keikutsertaan peran masyarakat di daerah harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja. Semua upaya pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ditujukan ke satu arah, yaitu untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Aceh yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) ini, yang juga akan berpengaruh kepada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Akhirnya, dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 diharapkan mampu merespon kebutuhan wajib dasar masyarakat dan mampu

mengoptimalkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara optimal, responsive, komprehensif dan merata di seluruh pelosok Provinsi Aceh.

Banda Aceh, Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yusrizal', is written over a horizontal line. There are some additional scribbles and a small mark to the right of the signature.

Dr. YUSRIZAL, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197506 199311 1 001